

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rusia mewarisi hak-hak istimewa sepeninggal Uni Soviet. Tidak hanya peranannya menggantikan kedudukan Uni Soviet di Dewan Keamanan PBB, tetapi juga pasukan militernya. Bahkan setelah pemisahan dari 14 negara yang sekarang memerdekakan diri, Rusia masih menjadi bangsa terluas di dunia.<sup>1</sup> Terlebih jika kita mengamati sepak terjang dalam menjalankan sistem perekonomiannya, terutama yang berkaitan dengan gas alam, yang menjadikan Rusia sebagai “Dewa Penyelamat” bagi masyarakat Eropa. Dengan gas alamnya, Rusia tidak hanya kebanjiran dolar dan euro, tetapi juga pengaruh politiknya yang jauh melebihi pada masa Uni Soviet maupun Tsar.<sup>2</sup> 40% peningkatan *petroleum* dunia dari tahun 2000-2004 datang dari Rusia.

Ketergantungan negara-negara Eropa dapat terlihat dari Jerman, yang mana 40% kebutuhan gas alamnya disalurkan dari Rusia. Hal ini tidak hanya digunakan untuk kebutuhan domestik saja, tetapi juga untuk menjalankan roda perindustriannya. Lebih ekstrem lagi, beberapa negara Baltik dan Finlandia bahkan menggantungkan impor gasnya 100% dari Rusia (Gazprom).<sup>3</sup> Sementara dalam kalkulasi wilayah (*region*), sekarang ini Eropa masih mengimpor 30% minyak dan 50% gas alam dari Rusia. Jika hal ini masih berlanjut, diperkirakan pada tahun 2030, ketergantungan Eropa akan energi (minyak dan gas alam) dari Rusia akan sangat besar, yakni mencapai 80%.<sup>4</sup>

Hal yang berperan besar dalam menjadikan Rusia sangat penting bagi Eropa adalah kehadiran Gazprom. Gazprom sendiri adalah perusahaan gas alam yang sahamnya 50% lebih dimiliki oleh pemerintah Rusia. Perusahaan inilah yang menyalurkan pasokan gas alam dari Rusia, tidak hanya kepada negara-negara Eropa Timur, tetapi juga negara-negara Eropa Barat. Rupanya tidak hanya Eropa

---

<sup>1</sup> Daniel Yergin & Thane Gustafson, *Russia 2010 And What It Means for the World*, London: Nicholas Brealey Publishing, 1994, h. 238.

<sup>2</sup> Marshall I. Goldman, *Petrostate: Putin, Power and the New Russia*, New York: Oxford University Press, 2008, h. 14.

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 2.

<sup>4</sup> Cynthia A. Roberts, *Russia and the European Union: The Sources and Limits of “Special Relationships,”* Carlisle, PA: U.S. Army War College, Strategic Studies Institute, 2007, h. 49.

yang dari hari ke hari ketergantungannya semakin meningkat akan gas Rusia, bahkan Amerika Serikat yang secara geografi sangat jauh dari Rusia (keduanya dipisahkan oleh samudera), mulai mengimpor dan menggunakan energi dari Rusia. Tercatat pada tahun 2005, AS mengimpor *petroleum* dari Rusia dengan nilai mencapai \$ 8 juta, setahun kemudian (2006) hal itu meningkat 25% dengan total transaksi senilai \$ 10 juta. Benar bahwa impor tersebut hanya mewakili 3% dari impor *petroleum* secara keseluruhan—kecil tetapi mengalami kenaikan 2.2% dibanding tahun 2004 dan tidak menutup kemungkinan akan mengalami kenaikan pada masa akan datang.<sup>5</sup> Lebih dari itu, pada tahun 2000, LUKoil, salah satu perusahaan minyak swasta terbesar di Rusia, telah membeli hampir 3000 stasiun pengisian (*filling station*) minyak di Amerika Serikat dari Getty Oil dan Mobil dan sekarang dengan sibuk mengubahnya ke dalam *outlet-outlet* LUKoil.<sup>6</sup>

Pada tahun 2006, Rusia mencatatkan diri sebagai negara produsen *petroleum* terbesar di dunia, produksinya bahkan melebihi Arab Saudi. Hal ini bukanlah yang pertama kali bagi Rusia. Sebelumnya pada akhir tahun 1970 dan 1980an, Rusia juga mencatatkan prestasi yang serupa.<sup>7</sup>

Memang benar bila Rusia diperkirakan tidak lama lagi akan menjadi negara super power di bidang militer. Memang, tidak ada keraguan untuk mengatakan bahwa Rusia sebagai negara superpower, hanya saja sekarang superpower di bidang energi.<sup>8</sup>

Cita-cita Kremlin dalam politik energi bukan menjadi rahasia lagi. Ada skema dalam bidang strategi energi negara yang telah disetujui oleh Presiden Vladimir Putin pada musim panas pada tahun 2003, yang menempatkan kebijakan energi sebagai pusat diplomasi Rusia.<sup>9</sup> Cita-cita tersebut dengan jelas dikatakan bahwa industri sumber alam digunakan untuk menaikkan kekuatan *geo-political* Rusia. Tujuan tersebut dijabarkan dalam empat hal: *pertama*, Kremlin ingin mencegah negara-negara Eropa dalam melakukan diversifikasi persediaan sumber-sumber energi, khususnya dalam gas. *Kedua*, Kremlin ingin memperkuat

---

<sup>5</sup> Marshall I. Goldman, *op. cit.*, h. 1-3.

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 3.

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 4.

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 14.

<sup>9</sup> Edward Lucas, *The New Cold War: Putin's Russia and the Threat to the West*, New York: Palgrave Macmillan, 2008, h. 163.

atas penguasaan pasar gas internasional. *Ketiga*, Kremlin ingin mendapatkan “aset hilir” - kemampuan distribusi dan penyimpanan - di negara-negara Barat. *Keempat*, Kremlin ingin menggunakan aset-asetnya untuk tekanan politik.<sup>10</sup>

Kondisi tersebut dapat dimaklumi mengingat Rusia adalah negara yang mempunyai cadangan gas alam (*natural gas*) terbesar di dunia. Para ahli memperkirakan Rusia menguasai 27-28 persen dari cadangan gas alam dunia, diikuti Iran dengan 15 persen, menyusul Qatar 14 persen. Meskipun Kanada menjadi penyuplai utama gas alam ke Amerika Serikat, negara tersebut hanya mampu menyumbang 1 persen dari total cadangan gas alam dunia.<sup>11</sup> Selain menguasai hampir 30% cadangan gas alam dunia, Rusia juga menjadi negara produsen minyak terbesar kedua setelah Arab Saudi.<sup>12</sup> Dalam kalkulasi tersebut, jelaslah sudah bahwa Rusia menempati posisi yang dominan baik dalam kepemilikan cadangan gas alam maupun minyak.

Rusia selain diberkahi gas alam yang melimpah ruah juga sebagai pengontrol jalur pipa gas tersebut. Potensi inilah yang dijadikan sebagai alat untuk menjadikan Rusia lebih kuat baik itu secara politik maupun secara ekonomi.

Hal ini sangatlah wajar jika Rusia nantinya melakukan keamanan terhadap energinya (*energy security*), baik energi minyak maupun gas alamnya. Tindakan ini dilakukan agar ketersediaan pasokan energi baik terhadap skala domestik (kebutuhan dalam negeri) maupun skala internasional (kebutuhan negara-negara pengimpor) tetap dapat terpenuhi. Selain itu, keamanan energi dilakukan karena adanya kecenderungan penurunan ketersediaan energi dunia. Para penghasil energi dikhawatirkan di samping tidak dapat memenuhi permintaan dunia akan energi yang semakin meningkat, juga adanya kekhawatiran akan bahaya dari para teroris, pemberontak dan kelompok-kelompok separatis yang seringkali mengganggu dan menyerang instalasi minyak dan gas.<sup>13</sup> Dengan kata lain, pasokan energi yang cukup (*sufficient supplies*) dari sumber-sumber energi tetap dipertahankan, selain itu, pengirimannya kepada konsumen (negara-negara pengimpor) harus dipastikan aman (*unhindered delivery*).

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Marshall I. Goldman, *op. cit.*, h. 139.

<sup>12</sup> <<http://www.StrategicStudiesInstitute.army.mil/>> (diakses 5 Januari 2010)

<sup>13</sup> Michael T. Klare, *Energy Security* dalam Paul D. William (editor), *Security Studies: An Introduction*, Kanada dan New York: Routledge, 2008, h. 483.

Dalam menjalankan keamanan energinya, Rusia melakukan beberapa kebijakan, salah satunya adalah pengambilan atau pembelian saham di atas 50% atas perusahaan-perusahaan energi swasta. Hal tersebut dilakukan karena pengiriman dan penerimaan suplai energi yang cukup adalah sangat penting untuk kesehatan ekonomi negara. Intervensi dari otoritas negara dalam manajemen pengiriman dan penerimaan energi juga ditujukan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan negara akan energi.<sup>14</sup> Cara lain dalam keamanan energi yaitu dengan mencari sumber-sumber energi baru, baik itu di dalam wilayah Rusia sendiri, maupun di luar wilayahnya (ekspansi). Hal tersebut dilakukan mengingat sumber-sumber lama semakin mengalami penurunan dalam jumlah produksinya. Politik energi ini dilakukan oleh Rusia demi mendapatkan *political leverage* di kawasan (Eropa) dan *economic gain*.

Adapun contoh politik energi Rusia secara meyakinkan diperagakan oleh Presiden Vladimir Putin ketika memaksa Ukraina untuk menyepakati harga gas secara sepihak. Dalam pernyataannya Putin menegaskan “jika Victor Yushchenko (Presiden Ukraina) menginginkan lebih dekat dengan Barat (Eropa Barat dan AS), maka dia harus bersiap-siap untuk membayar harga gas seperti negara-negara Eropa Barat bayarkan kepada Rusia.”<sup>15</sup> Perlu diketahui, selama ini Rusia memberikan subsidi ekspor energi kepada negara-negara bekas Uni Soviet (CIS–*Commonwealth of Independent States*) dengan harga tiga kali lipat lebih murah dari harga yang ditetapkan Rusia terhadap negara-negara Eropa Barat. Kepada Barat, Rusia memberikan harga normal pasar (*market price*), yang mana tidak ada subsidi samasekali.

Sebenarnya tarik-menarik antara Rusia dengan Eropa Barat (AS) dalam menanamkan pengaruh politiknya di Ukraina sudah terlihat sejak awal kemerdekaan negara tersebut (Ukraina). Leonid Kravchuk sebagai presiden pertama Ukraina juga telah mencondongkan dirinya untuk lebih terbuka di dalam kebijakan luar negerinya dengan Eropa Barat (AS) daripada kepada Rusia. Dan

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 484.

<sup>15</sup> Marshall I. Goldman, *op. cit.*, h. 144.

penerusnya, Leonid Kuchma juga masih menerapkan *west-oriented* dalam kebijakan luar negerinya.<sup>16</sup>

Ukraina menandatangani untuk keanggotaan NATO akan datang dalam perjanjian kerjasama untuk perdamaian atau *Partnership for Peace (PfP) agreement* dengan NATO pada tahun 1994. Di samping itu, Ukraina juga menandatangani untuk keanggotaan Uni Eropa akan datang dalam *Partnership Agreement* dengan Uni Eropa pada tahun yang sama. Kemudian pada tahun 1999, *UE Common Strategy* untuk Ukraina diadopsi, yang berujung dengan dimasukkannya Ukraina sebagai *European Neighbourhood Policy (ENP)* pada tahun 2004.<sup>17</sup>

Rusia memandang serius keintiman yang diperlihatkan antara Eropa Barat (AS) dengan Ukraina. Karena bagaimanapun, Rusia masih menganggap Ukraina penting untuk dirangkul demi mempertahankan dan meningkatkan *geo-political* maupun *geo-economic* Rusia di kawasan. Maka dari itu, Rusia dengan terang memperlihatkan ketidak senangannya atas kedekatan Ukraina dengan NATO. Secara resmi Rusia menentang ekspansi NATO ke Timur (Eropa Timur).<sup>18</sup>

Selanjutnya, dengan percaya diri Rusia mengancam akan mencabut subsidi yang diberikan kepada Ukraina. Pada tahun 2004-2005, Rusia menetapkan harga subsidi kepada Ukraina. Setelah disubsidi, harga tersebut menjadi sebesar \$50 per 1000 meter kubik, sementara pada waktu itu harga pasar (tanpa subsidi) mencapai \$150 per 1000 meter kubik.<sup>19</sup> Jika Ukraina tidak mengindahkan ancaman dari Rusia (seruan Putin), maka bersiap-siaplah Ukraina menerima harga baru yang mana jelas-jelas sangat mencekiknya. Sekali lagi Putin menegaskan, “Ukraina seharusnya berfikir dua kali jika benar-benar ingin jatuh ke pelukan Barat.” Hal yang berbeda dialami Belarus, dengan lebih memilih merapat (beraliansi) dengan Rusia, maka harga subsidi sebesar kurang dari \$50 per 1000 meter kubik yang diterimanya tidak diganggu gugat.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> Bertil Nygren, *The Rebuilding of Greater Russia: Putin's foreign policy towards CIS countries*, London and New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2008, h. 50.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 54.

<sup>19</sup> Marshall I. Goldman, *op. cit.*, h. 144.

<sup>20</sup> *Ibid.*

Dalam kasus ini, Putin menerapkan *political leverage* di kawasan (Eropa) dengan menjadikan energi (minyak dan gas alam) sebagai alat jitu untuk mewujudkannya. Rusia masih memandang Ukraina sebagai wilayah penting, karena kedekatannya secara geografis dengan Rusia. Alasan lain adalah *pertama* bahwa Ukraina adalah negara penting yang dijadikan Rusia sebagai transit minyak dan gasnya yang akan disalurkan ke negara-negara Eropa Barat – 80% ekspor gas Rusia ke Eropa Barat adalah lewat Ukraina.<sup>21</sup> *Kedua*, Ukraina dipandang Rusia sebagai wakil dari negara-negara miskin energi dan sangat menggantungkan energinya terhadap impor dari Rusia.<sup>22</sup>

Rusia bagaimanapun masih berniat dan ingin mengembalikan bahkan melebihi kejayaan Uni Soviet dulu dengan merangkul kembali negara-negara CIS (*Commonwealth of Independent States*) ke dalam pelukannya, sebagaimana dulu mereka (negara-negara CIS) melakukannya dengan Uni Soviet.

## 1.2 Rumusan Permasalahan

Secara tradisional, proses sekuritisasi dilakukan oleh negara. Adapun tujuannya adalah untuk menghilangkan suatu ancaman. Maka dari itu negara dapat melakukan apapun untuk menjalankan sekuritisasi demi mencapai tujuannya tersebut. Terkait hal ini Buzan *et. al.* menyatakan bahwa:

*“Traditionally, by saying “security,” a state representative declares an emergency condition, thus claiming a right to use whatever means are necessary to block a threatening development.”*<sup>23</sup>

Sebagaimana penjelasan di atas, negara, memang berperan penting dalam menjalankan sekuritisasi, tidak terkecuali dalam kaitannya dengan keamanan energi (*energy security*). Dalam hal ini, negara memandang perlu dilakukannya keamanan energi (minyak dan gas alam) mengingat keduanya sangat berperan penting demi kelangsungan eksistensi makhluk hidup. Sebagai contoh, manusia

<sup>21</sup> Margarita M. Balmaceda, *Energy Dependency, Politics and Corruption in the Former Soviet Union: Russia's Power, Oligarchs' Profits and Ukraine's Missing Energy Policy, 1995-2006*, New York dan London: Taylor & Francis Routledge, 2008, h. 10.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Barry Buzan, *et al.*, *Security: A New Framework for Analysis*, Colorado dan London: Lynne Rienner, 1998, h. 21.

harus mengkonsumsi makanan supaya mendapatkan energi kalori; lebih kompleks lagi, masyarakat juga membutuhkan energi untuk memperoleh makanan dan minuman untuk mendirikan kota, membangun pabrik, jalan raya, rel kereta api dan sebagainya. Memang, dalam masyarakat kompleks dan produktif, kebutuhan akan energi lebih besar; tanpa suplai bahan bakar yang cukup, masyarakat kompleks tidak dapat mempertahankan hasil industri yang tinggi, memberikan penghidupan layak bagi warga kotanya atau sekedar untuk bertahan dari kuatnya persaingan.<sup>24</sup> Dengan ini, keamanan energi (*energy security*) dapat diartikan sebagai intervensi pemerintah (negara) atas pengelolaan penerimaan energi dan distribusinya.<sup>25</sup>

Dalam kaitannya dengan Rusia, energi digunakan negara tersebut tidak hanya untuk meningkatkan perekonomian (*economic gain*), tetapi juga untuk menguatkan pengaruh politik (*political leverage*) di kawasan (Eropa). Hal ini dikarenakan adanya kenyataan bahwa Rusia dianugrahi cadangan minyak dan gas alam yang melimpah ruah juga adanya ketergantungan Eropa akan impor gas dari Rusia.

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan studi kasus yang telah disajikan di atas (latar belakang), penelitian ini ditujukan untuk menganalisisnya (studi kasus) dengan pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: **“Mengapa Rusia melakukan politik energi terhadap Ukraina?”**

### 1.4 Tujuan atau Signifikansi Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tindakan Rusia dalam melakukan politik energi dengan sekuritisasi/keamanan energi minyak dan gas alamnya. Selain itu, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kejelasan tentang tindakan politik Rusia khususnya pada masa Presiden Vladimir Putin terhadap negara Ukraina.

<sup>24</sup> Michael T. Klare, *op. cit.*, h. 484.

<sup>25</sup> *Ibid.*

## 1.5 Tinjauan Pustaka

Ide penelitian ini berawal dari dua buah buku, yang *pertama* berjudul “*PETROSTATE: Putin, Power, And the New Russia*” yang ditulis oleh Marshall I. Goldman, dan diterbitkan pada tahun 2008 oleh Oxford University Press. Dalam buku tersebut, Goldman menjelaskan tentang bagaimana Rusia berusaha untuk memonopoli energi minyak dan energi gasnya tidak hanya terhadap Eropa Timur, tetapi juga terhadap Eropa Barat. Monopoli tersebut ditujukan disamping untuk meningkatkan perekonomian Negara, yang lebih penting lagi adalah untuk meningkatkan pengaruh politik Rusia di kawasan Eropa. Karena Rusia menyadari betul bahwa banyak Negara Eropa yang sangat menggantungkan energi, khususnya energi gas dari Rusia ataupun dari Asia Tengah yang disalurkan lewat Rusia.

Usaha monopoli tersebut terlihat dengan kebijakan Negara untuk mengakuisisi perusahaan gas alam “*Gazprom*” dengan cara membeli lebih dari 50% saham perusahaan tersebut.<sup>26</sup> *Gazprom* sendiri adalah perusahaan paling besar di Rusia dan menjadi perusahaan gas alam terbesar di dunia.<sup>27</sup> Rusia tidak hanya memiliki mayoritas saham dari *Gazprom*, tetapi juga memegang kendali penuh atas distribusi penjualan di luar negeri, sampai pada pengoperasian pengisian minyak di stasiun-stasiunnya (luar negeri),<sup>28</sup> walaupun dalam hal ini Rusia bekerjasama dengan beberapa perusahaan Barat, tetapi Rusia tetap menempati posisi yang dominan.

Langkah selanjutnya adalah peningkatan produksi energi (minyak dan gas). Rusia menyadari betul bahwa energi minyak dan gas sangat berperan besar tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya, tetapi juga untuk meningkatkan pendapatan mata uang asing.<sup>29</sup>

Memang Rusia terlihat sangat dominan bahkan dapat dikatakan semena-mena dalam menjalankan politik energinya (minyak dan gas). Kenyataan ini senada dengan pernyataan Igor Shuvalov (penasihat ekonomi Presiden Vladimir Putin) pada 2006: “*Europe will never have a more reliable supplier than*

<sup>26</sup> Marshall I. Goldman, *op. cit.*, h. 2.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 31.

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 32.



*Russia.*”<sup>30</sup> Jelaslah bahwa Eropa memang sangat mengandalkan suplai energi minyak dan gas dari Rusia. Pernyataan yang lebih tegas dilontarkan Presiden Putin pada bulan Juni tahun 2007 dalam pertemuan kerjasama energi Balkan di Zagreb: “for four decades now, despite the serious and truly global changes in the world, Russia has never broken a single one of its contractual commitments.”<sup>31</sup>

Bagaimanapun, kalau kita menengok fakta bahwa Uni Soviet pada waktu dulu atau Rusia pada era sekarang setelah tahun 1991 sering melakukan ancaman jika Rusia merasa terganggu dengan ketidak patuhan negara-negara Eropa terhadap kebijakan Rusia baik yang menyangkut ekonomi maupun politik. Oleh karena itu, Rusia tidak jarang menghukum negara-negara tersebut dengan cara menghentikan pengiriman suplai energinya. Sebagai contoh: terhadap Yugoslavia di bawah kepemimpinan Tito, Israel pada tahun 1956, Finlandia tahun 1958, China tahun 1959, Latvia tahun 1990, Lithuania tahun 1990 dan 2006, dan Estonia pada tahun 2007.<sup>32</sup> Kemudian, kebijakan penghentian atau pengurangan suplai energi juga terjadi terhadap Ukraina, Belarusia, Georgia, Moldova, dan bahkan Bosnia.<sup>33</sup> Singkatnya, menurut hemat penulis, Putin menerapkan kebijakan keamanan energinya demi meningkatkan perekonomian dan perpolitikan Rusia di kawasan Eropa.

Adapun buku *kedua* yang dijadikan penulis sebagai cikal bakal penelitian ini adalah “*The New Cold War: Putin’s Russia and the Threat to the West*” yang ditulis oleh Edward Lucas, dan diterbitkan oleh Palgrave Macmillan pada tahun 2008. Pada Bab VII dijelaskan bahwa politik energi yang dijalankan oleh Rusia adalah bukan suatu kerahasiaan lagi.<sup>34</sup> Energi minyak dan gas digunakan oleh Presiden Vladimir Putin sebagai senjata jitu untuk memperlihatkan Rusia sebagai Negara besar dan kuat, bahkan patut diperhitungkan dalam percaturan politik internasional sebagaimana Uni Soviet dulu. Banyak analis mengatakan bahwa Putin mempunyai cita-cita besar untuk menggunakan industri-industri sumber energi untuk menaikkan kekuatan geo-politik Rusia.<sup>35</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 49.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Edward Lucas, *op. cit.*, h. 163.

<sup>35</sup> *Ibid.*

Kebijakan Rusia mengenai energi memang begitu nyata dan kuat. Bahkan Uni Eropa pun belum bisa untuk sekedar merayu Rusia untuk meliberalisasi energinya. Seperti kita ketahui, selama ini Rusia masih kekeh untuk memonopoli energi gas lewat jalur pipa gasnya. Kebijakan ini tergambar dalam pernyataan Putin di bawah ini:

*“The gas pipeline system is the creation of the Soviet Union. We intend to retain state control over the gas transport system and over Gazprom. We will not split Gazprom up. And the European Commission should not have any illusions. In the gas sector, they will have to deal with the state.”*<sup>36</sup>

Jalur pipa tersebut tidak hanya jauh paling lebih murah dan paling praktis untuk pengiriman gas, tetapi Eropa sangat tergantung dengan gas yang diimpor lewat jalur-jalur pipa Rusia. Dan ketergantungan tersebut ke depannya akan mengalami kenaikan.<sup>37</sup> Perlu diketahui, konsumsi gas negara-negara Eropa, 60% diimpor, dan hampir separonya dari Rusia. Bahkan diperkirakan dalam 20 tahun mendatang, ketergantungan Negara-negara Eropa terhadap impor energi gas Rusia akan mengalami peningkatan sampai 80%. Hal ini sebagai konsekuensi dari penurunan produksi gas Negara-negara Eropa sendiri, sedangkan kebutuhan akan gas semakin meningkat.<sup>38</sup>

Oleh karena itu sangatlah wajar jikalau Rusia menggunakan kekuatan energinya untuk menaikkan kekuatan baik secara ekonomi maupun secara politik. Contoh nyata yaitu ketika Rusia berselisih dengan Ukraina pada akhir 2005, masalah ini dipicu lantaran Rusia dengan sepihak menaikkan harga gas alam terhadap Ukraina, yang nantinya berimbas pada penghentian aliran gas dari Rusia kepada Ukraina. Kebijakan yang diambil Rusia ini tidak hanya membuat panik Ukraina, tetapi juga terhadap negara-negara Eropa. Secara singkat Lucas menyatakan bahwa Rusia memang sedang berusaha meningkatkan baik *political leverage* maupun *economic leverage*<sup>39</sup> di kawasan (Eropa).

<sup>36</sup> Michael Fredholm, *Gazprom in Crisis: Putin's Quest for State Planning and Russia's Growing National Gas Deficit*, Swindon, UK: Conflict Studies Research Centre, 2006,

<sup>37</sup> Edward Lucas, *op. cit.*, h. 164.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 168.

Tindakan sepihak dan terkesan semena-mena Rusia, yang tidak dapat diimbangi oleh Eropa, memperlihatkan betapa Rusia sekarang ini sedang menunjukkan satu kekuatan yang patut diperhitungkan dunia, khususnya Eropa Barat (AS).

Dengan beberapa argumen yang disajikan oleh Goldman dan Lucas inilah yang memberanikan penulis untuk menganalisis lebih lanjut tentang perselisihan antara Rusia dan Ukraina dalam hal kesepakatan harga gas alam dan penyalurannya dan mengapa Rusia melakukan politik energi terhadap Ukraina.

## **1.6 Kerangka Pemikiran: Teori Sekuritisasi (*securitization*), dan Konsep Keamanan Energi (*energy security*)**

### **1.6.1 Formasi Konsep**

Di dalam penelitian ini, penulis menfokuskan penelitiannya pada konsep sekuritisasi khususnya sekuritisasi di bidang energi (*energy security*) yang dijalankan oleh Rusia kepada negara tetangganya yaitu Ukraina. Dalam kebijakan keamanan energinya, Rusia tidak hanya melakukan suplai yang cukup atau “*sufficient supplies*” energinya baik terhadap kebutuhan dalam negeri, maupun terhadap kebutuhan luar negeri (negara-negara pengimpor), tetapi Rusia juga memastikan keamanan dalam pengirimannya atau “*unhindered delivery*.”<sup>40</sup> Adapun dalam studi kasusnya, penulis menghadirkan adanya perselisihan / tarik-ulur dalam menetapkan kesepakatan harga gas antara Rusia (sebagai negara pengirim) dengan Ukraina (sebagai negara penerima). Dalam hal ini, energi (minyak dan gas alam) digunakan oleh Rusia selain untuk “*political leverage*” terhadap Eropa Barat (AS) juga untuk meningkatkan pendapatannya atau “*economic gain*.”

Indikasi-indikasi tersebut dapat diamati dari upaya Rusia dalam meningkatkan pengaruhnya di kawasan tersebut. Bagi Rusia, Ukraina dianggap penting untuk mempertahankan bahkan meningkatkan pengaruh geo-politik maupun geo-ekonomi (Rusia) di kawasan (Eropa).

---

<sup>40</sup> Michael T. Klare, *op. cit.*, h. 484-485.

Secara politik, keamanan energi dijadikan Rusia sebagai *political leverage*, salah satu caranya dengan menerapkan *political pressure* terhadap Ukraina. Hal ini terlihat dengan keteguhan Rusia untuk tidak melanjutkan subsidiya kepada Ukraina yang disebabkan kedekatannya Ukraina dengan Eropa Barat (AS) ketimbang dengan Rusia. Situasi seperti inilah yang ditakutkan oleh Rusia, karena secara kedekatan geografi Ukraina sangat dekat dengan Rusia, jikalau Eropa Barat (AS) dapat menguasai Ukraina, tidak menutup kemungkinan kedepannya Rusia akan mendapatkan gangguan-gangguan dari Eropa Barat (AS).

Sedangkan, secara ekonomi, keamanan energi digunakan oleh Rusia untuk meningkatkan pendapatannya (*economic gain*), mengingat sekarang ini banyak negara Eropa yang menggantungkan energinya terhadap Rusia, baik sekedar untuk kebutuhan domestik maupun untuk menghidupkan roda perindustrian.

Kemudian, dalam penelitian ini, penulis memilih **keputusan Rusia menjalankan politik energi terhadap Ukraina** sebagai **variabel terikat (dependen)**, sedangkan **variabel bebasnya (independen)** berupa **faktor-faktor yang menyebabkan Rusia menjalankan kebijakan politik energi**.

### 1.6.2 Teori

Penelitian ini, penulis menggunakan teori “**sekuritisasi**” (*securitization*) dari Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde dan konsep “**keamanan energi**” (*energy security*) nya Michael T. Klare. Dalam proses pengidentifikasian isu-isu yang dijadikan sebagai isu keamanan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Proses sekuritisasi (*securitization*); pengidentifikasian suatu isu tertentu (politik maupun selain politik) yang tujuannya menjadikan isu tersebut sebagai agenda keamanan. Adapun aktor yang mensekuritisasi disebut *Securitizing Actors*. Sekuritisasi itu sendiri adalah:

*“Security” is the move that takes politics beyond the established rules of the game and frames the issue either as a special kind of politics or as above politics. Securitization*

*can thus be seen as a more extreme version of politicization.*"<sup>41</sup>

Adapun aktor yang mensekritisasi, spektrum isu yang disekritisasi, maupun pensekritisasiannya (*securitize*), Buzan *et. al.* menjelaskan bahwa:

*"In theory, any public issue can be located on the spectrum ranging from nonpolitized (meaning the state does not deal with it and it is not in any other way made an issue is part of public debate and decision) through politicized (meaning the issue is part of public policy, requiring government decision and resource allocations or, more rarely, some other form of communal governance) to securitized (meaning the issue is presented as an existential threat, requiring emergency measures and justifying actions outside the normal bounds of political procedure).*"<sup>42</sup>

Walaupun aktor yang mensekritisasi suatu isu tidak selamanya berupa negara (*state*) pada kenyatannya, negaralah yang sering berperan aktif dalam melakukan sekritisasi terhadap suatu isu.

*"In principle, the placement of issues on this spectrum is open: Deepening upon circumstances, any issue can end up on any part of the spectrum. In practice, placement varies substantially from state to state.*"<sup>43</sup>

2. Kondisi pendukung dalam pensekritisasi (*facilitating conditions*); suatu konteks keadaan yang mampu memperkuat opini publik terhadap sesuatu ancaman yang di sekritisasi oleh aktor sekritisasi.

*"...power, however, is never absolute: No one is guaranteed the ability to make people accept a claim for necessary security action, nor is anyone excluded from attempts to articulate alternative interpretations of security. The field is structured or biased, but no one conclusively "holds" the power of securitization. Therefore,...that one can not make the actors of securitization the fixed point of analysis—the practice of securitization is the center of analysis.*"<sup>44</sup>

<sup>41</sup> Barry Buzan, *et al, op. cit.*, h. 23.

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 23-24.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*, h. 32.

3. Unit-unit analisa keamanan (*the units of security analysis: actors and referent objects*). Dalam analisa keamanan, ada tiga aktor yang mana masing-masing mempunyai peran dan fungsi. Lebih lanjut Buzan menjelaskan dengan yang disebut sebagai “*speech-act*”—suatu proses sekuritisasi yang diawali dengan pernyataan yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi terhadap sesuatu yang dianggap sebagai ancaman yang nyata. Adapun tiga hal tersebut adalah:

*“The speech-act approach to security requires a distinction among three types of units involved in security analysis:*

- *Referent objects: things that are seen to be existentially threatened and that have a legitimate claim to survival.*
- *Securitizing actors: actors who securitize issues by declaring something—a referent object—existentially threatened.*
- *Functional actors: actors who affect the dynamics of a sector. Without being the referent object or the actor calling for security on behalf of the referent object, this is an actor who significantly influences decisions in the field of security.”<sup>45</sup>*

4. Konstelasi sekuritisasi (*constellations of securitization*); proses pemetaan kompleks keamanan (*security complexes*), dengan tujuan untuk menganalisa pola keterkaitan keamanan dari beberapa kompleks keamanan yang berbeda. Dalam hal ini, ada tiga cara:

*“In the part of this work aimed at tracing security complexes, the approach is to look at the pattern of security connectedness. The investigation proceeds in three steps:*

- *Is the issue securitized successfully by any actors?*
- *If yes, track the links and interactions from this instance—how does the security action in this case impinge on the security of others, and where does this then echo significantly?*
- *These chains can then be collected as a cluster of interconnected security concerns.”<sup>46</sup>*

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 35-36.

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 42-43.

Berbicara sekuritisasi, sangat erat kaitannya dengan terminologi ancaman yang nyata (*existential threat*), ancaman tersebut berada pada beberapa sektor dan level analisis yang berbeda-beda, yaitu: sektor militer (*military sector*), sektor politik (*political sector*), sektor ekonomi (*economic sector*), sektor sosial (*societal sector*), dan sektor lingkungan (*environmental sector*).

Di dalam penelitian ini, penulis menganggap keamanan energi (*energy security*) dapat dimasukkan ke dalam keamanan sektor lingkungan (*environmental security sector*) beberapa analis memasukkan keamanan lingkungan (*environmental security*) ke dalam ranah militer dan politik (*a political and military lens*), sedangkan analis yang lain menganggap keamanan lingkungan ke dalam ranah isu kesejahteraan sosial (*a social welfare issue*).<sup>47</sup>

Lebih jauh Buzan *et. al.* mengklasifikasikan sektor lingkungan ke dalam beberapa hal, antara lain:

- *Disruption of ecosystems* includes climate change; loss of biodiversity; deforestation, desertification, and other forms of erosion; depletion of the ozone layer; and various forms of pollution.
- *Energy problems* include the depletion of natural resources, such as fuel wood; various forms of pollution, including management disasters (related in particular to nuclear energy, oil transportation, and chemical industries); and scarcities and uneven distribution.
- *Population problems* include: population growth and consumption beyond the earth's carrying capacity; epidemics and poor health conditions in general; declining literacy rates; and politically and socially uncontrollable migrations, including unmanageable urbanization.
- *Food problems* include poverty, famines, overconsumption, and diseases related to these extremes; loss of fertile soils and water resources; epidemics and poor health condition in general; and scarcities and uneven distribution.
- *Economic problems* include the protection of unsustainable production modes, societal instability inherent in the growth imperative (which leads to cyclical and hegemonic breakdowns), and structural asymmetries and inequity.
- *Civil strife* includes war-related environmental damage on the one hand and violence related to environmental degradation on the other."<sup>48</sup>

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 71.

<sup>48</sup> *Ibid.*, h. 74-75.

Kemudian, penulis menggunakan konsep yang diusung oleh Michael T. Klare tentang *energy security* untuk menjawab pertanyaan penelitian ini. Adapun yang dimaksud *energy security* menurut T. Klare adalah seperti di bawah ini:

*“The intervention of state authorities in the management of energy acquisition and distribution is typically justified in terms of ‘energy security’—that is, ensuring that appropriate incentives and policy instruments are in place to impel private firms to take the steps needed to produce and deliver adequate supplies of energy to meet the nation’s requirements; when the private sector proves unequal to this crucial task, the state must be prepared to step into the breach.”*<sup>49</sup>

Memang, tidak ada standarisasi dalam pendefinisian *energy security*, Tetapi banyak analis menggambarannya seperti di bawah ini:

*“It (energy security) as the assured delivery of adequate supplies of affordable energy to meet a state’s vital requirements, even in times of international crisis or conflict.”*<sup>50</sup>

Lebih lanjut, konsep *energy security* dapat dipahami dengan dua hal, pertama, usaha untuk mendapatkan energi yang cukup (*sufficient supplies*) dan kedua, memastikan pengiriman (energi) dengan aman (*unhindered delivery*) dari produsen kepada konsumen.

*“In practice, this is usually understood to encompass the dual functions of ensuring the procurement of sufficient supplies of energy to meet fundamental needs as well as ensuring their unhindered delivery from point of production to ultimate consumer.”*<sup>51</sup>

Konsep *energy security* dengan menggunakan cara-cara di atas “*sufficient supplies*” (*renationalization and searching new energy sources*) dan “*unhindered delivery*” (*control networks of pipeline*) ditujukan untuk “*political leverage*” dan “*economic gain.*”

<sup>49</sup> Michael T. Klare, *op. cit.*, h. 484.

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*, h. 484-485.



Adapun istilah “*political leverage*” sebagian menyebutnya “*political pressure*”, “*political weapon*”, “*political purposes*” dan “*economic gain (gaining economy)*” penulis ambil dari beberapa referensi buku dan artikel yang penulis temukan. Seperti *Russia Energy and European Security: A Transatlantic Dialogue* (2008) yang ditulis oleh Paul J. Saunders:

*“Russia’s efforts to use its energy resources for **political leverage** grows, European demand for gas is itself growing at a rate that can be satisfied only with substantial additional imports from Russia or, alternatively, a major new arrangement with Iran—something troubling to many Americans.”<sup>52</sup>*

Edward Lucas dalam *The New Cold War* (2008) juga menyatakan bahwa industri sumber daya alam (khususnya gas alam) digunakan Rusia salah satunya adalah untuk “*Political Pressure*” kepada negara-negara Eropa yang kurang sepaham dengan Rusia dalam pandangan politiknya:

*“The aim of the natural-resource industry is to boost the geopolitical strength of Russia. In practice, that means four things. The Kremlin wants to prevent European countries from diversifying their sources of energy supply, particularly in gas. It wants to strengthen its hold over the international gas market. It wants to acquire “downstream assets”—distribution and storage capability—in Western countries. And it wants to use those assets to exert **political pressure**.”<sup>53</sup>*

Lebih lanjut Goldman dalam *Putin, Power, and the New Russia* (2008) malahan menganalisa bahwa Rusia mendapatkan pengaruh politik dengan sendirinya, dikarenakan negara tersebut kaya sumber daya alam petroleum, seperti pernyataan di bawah ini:

*“Forty percent of the world’s increased petroleum consumption from 2000 to 2004 came from Russia. As a result Russia found itself inundated not only with dollars and euros but with **political**”*

<sup>52</sup> Paul J. Saunders, *Russian Energy and European Security: A Transatlantic Dialogue*. Washington, DC: The Nixon Center, 2008, h. V.

<sup>53</sup> Edward Lucas, *op. cit.*, h. 163.

*leverage that in many respects exceeded anything enjoyed in either the Czarist or Soviet eras”.*<sup>54</sup>

Begitupun Margarita M. Balmaceda dalam *Energy Dependency, Politics and Corruption in the Former Soviet Union: Russia’s Power, Oligarchs’ Profits and Ukraine’s Missing Energy Policy* (2008) berpendapat bahwa karena ketergantungan Eropa dan negara-negara bekas Uni Soviet akan energi Rusia inilah yang dijadikan Rusia untuk tujuan-tujuan politiknya:

*“Russian government is using energy dependencies for **political purposes**, in order to pressure former Soviet republics into not pursuing “too close” relations with the West and into agreeing to Russian-led integration initiatives and otherwise following policies considered desirable by the Russian leadership.”*<sup>55</sup>

R. G. Gidadhubli dalam artikelnya *Rusia: oil and Gas* (2003) menegaskan bahwa sumber-sumber energi (minyak dan gas) ditujukan Rusia selain untuk meningkatkan perekonomian, juga untuk meningkatkan pengaruh politiknya:

*“Apart from **economic gain** from energy resources, the Russian state has used oil and gas as a **political weapon** to increase its influence within the CIS and in particular with the central Asian states, Byelorussia and Ukraine.”*<sup>56</sup>

### 1.6.3 Hipotesa

Rusia melakukan politik energi pada masa Presiden Vladimir Putin terhadap Ukraina dengan cara mensekritisasi energi (minyak dan gas alam) yang dilakukan untuk tujuan *political leverage* di kawasan (Eropa) dan *economic gain* negara Rusia sendiri.

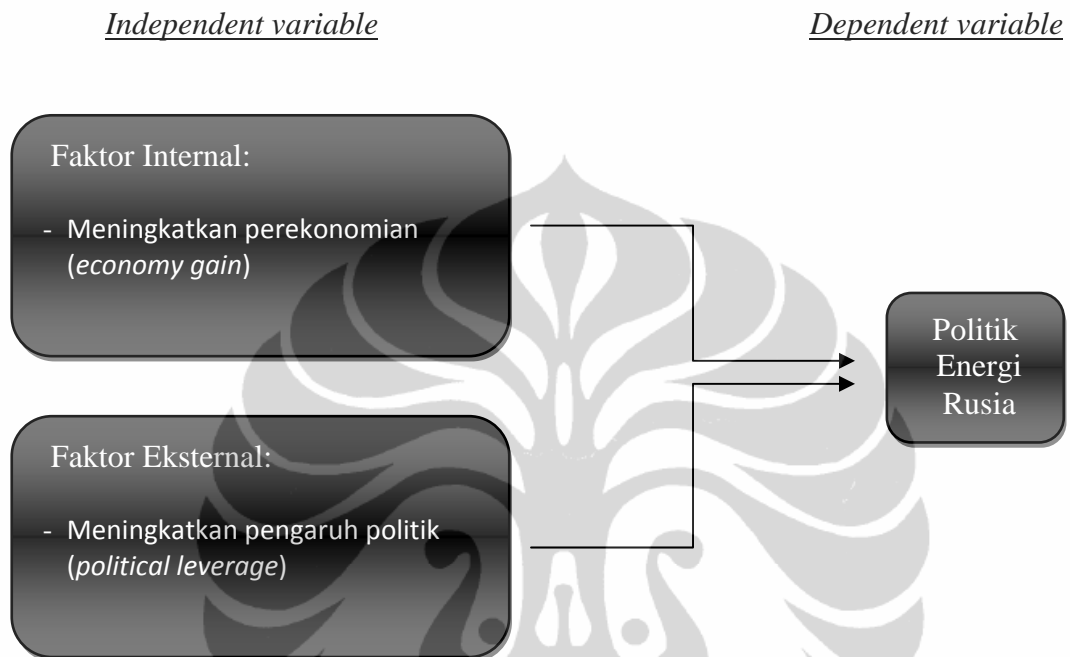
<sup>54</sup> Marshall I. Goldman, *op. cit.*, h. 14.

<sup>55</sup> Margarita M. Balmaceda, *op. cit.*, h. 8.

<sup>56</sup> R. G. Gidadhubli, *Russia: Oil and Politics*, Economic and Political Weekly, Vol. 38, No. 21 (May 24-30, 2003), h. 2025.

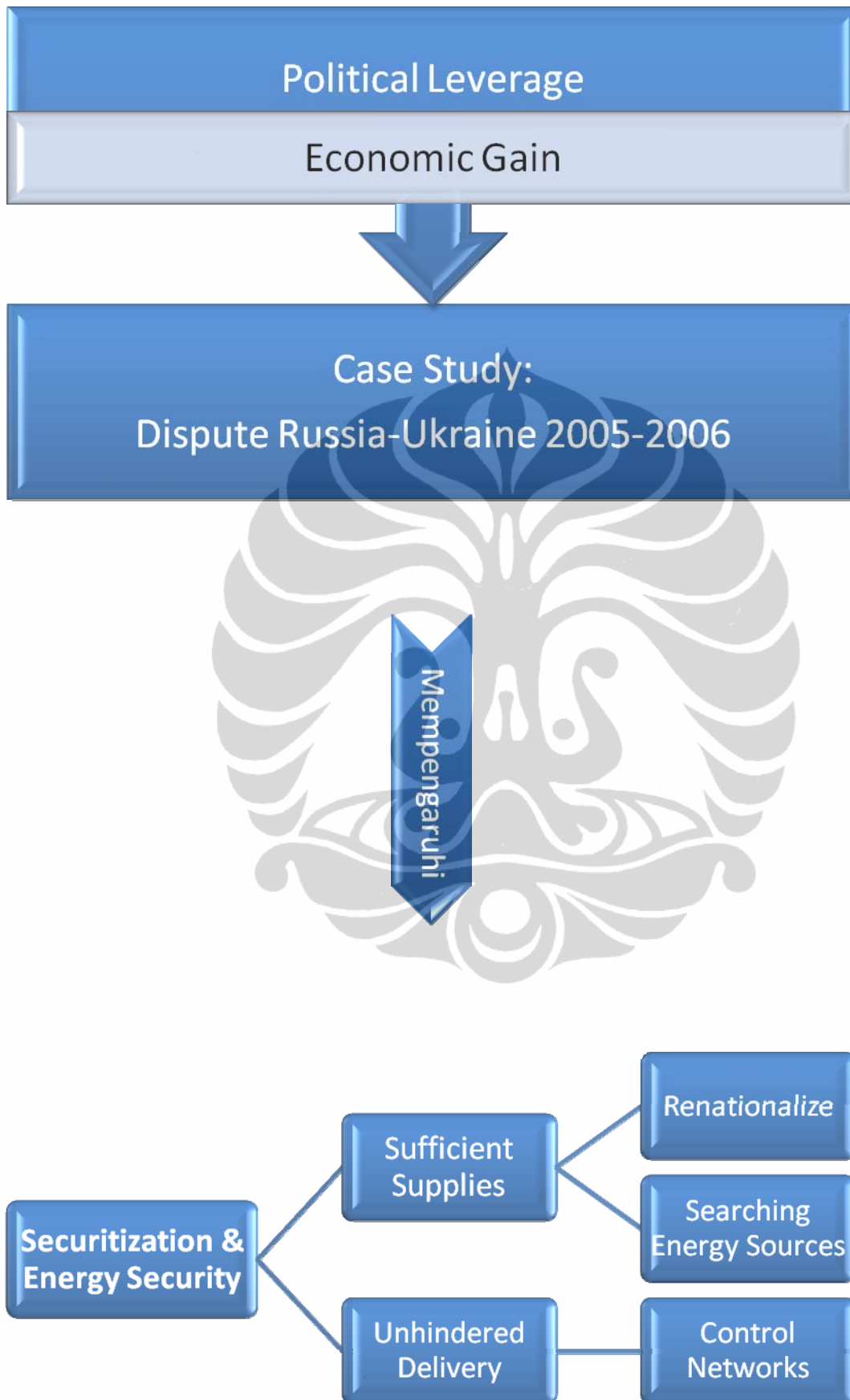
#### 1.6.4 Model Analisa

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini disajikan suatu model analisis sebagai berikut:



#### 1.6.5 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi Konsep merupakan cara untuk menurunkan konsep yang bersifat abstrak ke dalam bentuk konkrit. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua pemikiran utama, yaitu teori sekuritisasi dan konsep keamanan energi. Kedua teori dan konsep tersebut didasari oleh keinginan yang kuat untuk meningkatkan perekonomian dan menguatkan pengaruh politik di kawasan. Dan selanjutnya hubungan keduanya (teori sekuritisasi dan konsep keamanan energi) dan hal yang mendasarinya (ekonomi dan politik) tersebut akan dijabarkan melalui gambar di bawah ini:



### 1.6.6 Hubungan antar Konsep

Dalam hal ini penulis melihat ada hubungan antara teori sekuritisasi dan konsep keamanan energi, dengan ini pemerintah Rusia sebagai aktor sekuritisasi dibantu oleh aktor fungsional (beberapa perusahaan energi) menganggap energi sebagai objek yang perlu untuk diamankan, isu tersebut muncul karena adanya beberapa alasan: *pertama*, adanya kecenderungan produksi energi (minyak dan gas alam) yang menurun, sedangkan kebutuhan akan energi (khususnya minyak dan gas alam) diprediksi akan meningkat melebihi kapasitas produksi yang ada, *kedua*, sulitnya menemukan sumber-sumber ladang baru, dan *ketiga*, dalam beberapa kasus, sering terjadinya perselisihan antara negara pengirim dengan negara transit yang kemudian memunculkan kerugian bagi negara pengirim (pengekspor).

Dalam proses sekuritisasinya, kemudian negara mengeluarkan kebijakan yang berkenaan sekuritisasi energinya atau *speech-act*. Secara singkat, *speech-act* adalah suatu pemahaman subjektif elit/ negarawan terhadap suatu isu yang kemudian akan diangkat sebagai sebuah isu keamanan. *Speech-act* sendiri akan mempercepat ditempatkannya suatu isu ke dalam masalah keamanan. Hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya beberapa kebijakan untuk mengamankan energinya dengan cara: *pertama*, mempertahankan suplai energi dengan cukup, hal ini dapat dilakukan dengan renasionalisasi perusahaan swasta dan melakukan ekspansi ke luar dan kerjasama dengan pihak-pihak asing, *kedua*, mengamankan jalur pengiriman, dapat dilakukan dengan kontrol yang ketat terhadap jalur pipa minyak dan gas alam.

Dan pada akhirnya proses sekuritisasi ini tidak terlepas dari keinginan Rusia untuk meningkatkan perekonomian dan menguatkan pengaruh politiknya. Hal ini dapat terlihat dari terjadinya perselisihan gas antara Rusia dengan Ukraina pada tahun 2005-2006.

### 1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analitis* yang bertujuan untuk memberikan deskripsi, gambaran secara

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki melalui cara pengumpulan data setelah semua peristiwa yang hendak dikumpulkan telah selesai berlangsung.<sup>57</sup> Metode deskriptif ini digunakan untuk mengkaji sesuatu seperti apa adanya (variabel tunggal) atau pola hubungan (korelasional) antara dua atau lebih variabel.<sup>58</sup>

Adapun yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah politik energi yang digunakan Rusia terhadap Ukraina untuk meningkatkan perekonomian (*economic gain*) dan untuk menguatkan pengaruh politik (*political leverage*) di kawasan (Eropa). Variabel terikat dalam kasus ini adalah ketetapan Rusia dalam menerapkan kebijakan politik energi terhadap Ukraina. variabel bebas dalam kasus ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan Rusia melakukan politik energinya. Dalam hal ini, penelitian ditujukan untuk mendeskripsikan adanya korelasi antara dua variabel tersebut.

Penelitian ini akan menggunakan data primer berupa dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah Rusia, dan data sekunder berupa studi kepustakaan. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan atau studi dokumen dengan menggunakan beberapa data primer dan sekunder. Data sekunder tersebut didapat dari beberapa sumber, antara lain: di Unit Perpustakaan dan Dokumentasi Hubungan Internasional (UPDHI) FISIP-UI DEPOK, *website*, Jurnal *Jstor*, dan *gigapedia*. Pengumpulan data sekunder meliputi literatur yang relevan dengan penelitian berupa buku, artikel dari buku, surat kabar, dan jurnal ilmiah.

Menurut Bailey, studi dokumen merupakan suatu cara untuk memperoleh data yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang dapat diperoleh dengan cara membaca dan mempelajari dokumen-dokumen dan literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan ke-3, 1988, h. 63.

<sup>58</sup> Dr. Prasetya Irawan, *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Departemen Ilmu Administrasi Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006, h. 108.

<sup>59</sup> Kenneth D. Bailey, *Methodology of Social Research* (2<sup>nd</sup> ed.). New York: The Free Press, A Division of MacMillan Publishing Co. Inc., 1982, h. 38.

## 1.8 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis membagi dalam beberapa bab, yaitu bab satu yang merupakan bab pendahuluan, bab dua yang berisikan variabel dependen, bab tiga membahas variabel-variabel independen, bab empat merupakan bab penutup.

**BAB I** merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan dan signifikansi penelitian, kerangka pemikiran (teori sekuritisasi dan keamanan energi), formasi konsep, teori, hipotesa, model analisa, operasionalisasi konsep, hubungan antar konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** analisis terhadap politik energi Rusia pada masa Presiden Vladimir Putin. Adapun politik energi tersebut meliputi: usaha untuk mempertahankan suplai energi, menasionalisasi kembali perusahaan energi swasta, ekspansi ke luar dan kerjasama dengan pihak-pihak asing (menguatkan posisi perusahaan Rusia yang berada di luar negeri), dan melakukan kebijakan politik jalur pipa dengan cara monopoli kontrol atas jalur pipa tersebut.

**BAB III** menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi Rusia untuk menjalankan politik energinya. *Pertama*, faktor internal – untuk meningkatkan perekonomian (*economic gain*), *kedua*, faktor eksternal – untuk menguatkan pengaruh politik (*political leverage*). Kedua faktor inilah yang akhirnya juga menjadikan perselisihan antara Rusia dengan Ukraina pada akhir 2005 dan awal 2006.

**BAB IV** merupakan kesimpulan akhir mengenai analisis politik energi yang dijalankan Rusia terhadap Ukraina pada masa pemerintahan Presiden Vladimir Putin tahun 2000-2008.